

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : Radar Sampit Halaman : 04

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabangan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab Diminta

Tertib Kelola Aset Daerah

SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) didorong untuk tertib pengelolaan aset guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian bagi daerah.

Hal ini setelah DPRD Kotim melihat rekomendasi perbaikan pembangunan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas audit tahun anggaran sebelumnya.

"Berkenaan dengan penertiban aset milik pemerintah kabupaten, sesuai rekomendasi BPK agar tidak ada lagi aset Pemkab Kotim, yang diperjualbelikan oleh oknum - oknum tertentu untuk pihak - pihak tertentu," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon

Fabiansyah, Rabu (20/4).

Aset daerah berupa barang bergerak kendaraan maupun tidak bergerak tanah dan bangunan, wajib diinventarisasi. Selain untuk memudahkan pengawasan, hal itu juga agar optimalisasi bisa dilakukan terhadap aset tersebut.

Aset berupa tanah dinilai cukup rawan muncul masalah seperti terjadi tumpang tindih maupun di klaim pihak lain.

Upaya pengamanan yang harus dilakukan adalah memastikan legalitas kepemilikan tanah, sehingga memiliki kekuatan secara hukum.



**RISKON
FABIANSYAH**

Permasalahan aset yang menjadi perhatian BPK RI, diantaranya terkait aset tetap berupa tanah yang belum memadai yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Aset tersebut yakni lahan tempat pemakaman umum di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 6 yang sebagian

tumpang tindih serta tanah yang dijadikan kawasan Sport Center.

"Salah satu contoh adalah lahan kuburan di kilometer 6 Sudirman, karena kurang

tertibnya pemerintah daerah dalam mengelola dan mencatat aset daerah," ujarnya.

Selain masalah tumpang tindih yang harus diselesaikan, legalitas tanah tersebut juga menjadi perhatian. Pemkab Kotim diharapkan segera menyelesaikan masalah - masalah tersebut.

"Penggunaan dan pengelolaan keuangan aset daerah, terkait rekening pemerintah kabupaten yang masih menggunakan rekening pribadi, berdasarkan temuan dari BPK, perlu jadi perhatian khusus bagi pengelolaan keuangan daerah agar ke depan tidak ada lagi rekening atas nama pribadi," tandas Riskon. (ang/fm)